

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBD DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DI KOTA METRO: ANALISIS DOKUMENTER BERBASIS DATA SEKUNDER

Suharto¹, Alli Nurdin², Fingka Agustia³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Krakatau, ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Wirabuana, ³Fakultas Ekonomi Universitas Islam An Nur

hartoumm@gmail.com, allinurdin9@gmail.com, fingkaagustia@un-nur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro serta keterkaitannya dengan capaian pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Latar belakang penelitian didasari oleh kewajiban alokasi anggaran pendidikan minimal 20% sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta temuan berbagai kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana pendidikan belum tentu diikuti oleh efektivitas pemanfaatannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif berbasis analisis dokumen (studi data sekunder) yang seluruhnya bersumber dari publikasi resmi yang tersedia secara terbuka di internet, dengan objek Pemerintah Kota Metro, Provinsi Lampung, memanfaatkan data resmi berupa ringkasan APBD, Laporan Realisasi Anggaran agregat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045, serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Rasio efektivitas anggaran dihitung dan diinterpretasikan menggunakan kriteria baku pengukuran kinerja keuangan sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan realisasi belanja daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025 mencapai 94,78 persen dari target, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 kalinya, mengindikasikan tata kelola keuangan daerah yang relatif akuntabel pada level agregat. Namun demikian, indikator capaian pendidikan dalam RPJMD, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), secara konsisten berada di bawah target sepanjang 2021-2024 meskipun bertumbuh positif dari tahun ke tahun, mengindikasikan adanya kesenjangan antara efektivitas realisasi belanja daerah pada level agregat dengan capaian outcome pendidikan pada level substantif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), transparansi data terbuka (*open data*) hingga level program dan kegiatan, serta eksplorasi skema pembiayaan

hijau (green financing) sebagai pelengkap APBD untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pendidikan di Kota Metro.

Kata Kunci: *efektivitas anggaran; APBD; capaian pendidikan; pembangunan berkelanjutan; Kota Metro*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) management in Metro City and its relationship with sustainable education development outcomes. The study is motivated by the statutory obligation to allocate at least 20 percent of the budget to education, alongside prior findings suggesting that a large education budget allocation does not automatically translate into effective utilization. A descriptive-quantitative approach based on documentary analysis of secondary data, drawn entirely from officially published, openly available sources, was employed for the City of Metro, Lampung Province, using official data such as APBD summaries, aggregate Budget Realization Reports, the 2025-2045 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), and publicly reported Audit Board (BPK) results. Budget effectiveness ratios were calculated using standard public-sector financial performance criteria. Results indicate that Metro City's regional expenditure realization for fiscal year 2025 reached 94.78 percent of target, alongside an Unqualified Opinion (WTP) awarded for the sixteenth consecutive time, suggesting relatively accountable financial governance at the aggregate level. However, education outcome indicators in the RPJMD, namely Mean Years of Schooling (RLS) and Expected Years of Schooling (HLS), consistently fell below target throughout 2021-2024 despite positive year-on-year growth, indicating a gap between aggregate budget effectiveness and substantive education outcomes. The study recommends strengthening performance-based budgeting, open data transparency down to the program and activity level, and exploring green financing schemes to complement the regional budget in supporting sustainable education development in Metro City.

Keywords: *budget effectiveness; regional budget; education outcomes; sustainable development; Metro City*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia dan daya saing daerah dalam jangka panjang. Untuk mendukung tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui investasi pada sektor pendidikan, termasuk penyediaan infrastruktur dan sarana-prasarana pembelajaran yang memadai (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Meskipun demikian, sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan tidak serta-merta menjamin peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan apabila tidak diiringi oleh pengelolaan yang efektif dan berorientasi hasil (Astuti & Rahman, 2021; Hidayat & Susanto, 2020; Prasetyo & Nuryani, 2020; Putra & Kurniasih, 2021; Rahmadhea, 2025). Kajian pustaka terhadap efektivitas anggaran pendidikan di Indonesia menemukan bahwa proporsi dana pendidikan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih didominasi penggunaannya untuk kebutuhan operasional rutin (Astuti & Rahman, 2021; Lestari & Nugroho, 2022), sementara penerapan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dan prinsip Value for Money belum berjalan optimal (Sari & Handayani, 2021; Nasution & Rahayu, 2023). Pada level belanja modal daerah secara umum, tingkat penyerapan anggaran modal termasuk untuk pembangunan infrastruktur publik juga kerap ditemukan berada di bawah target yang direncanakan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi efisiensi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh (Chandra, Darwanis, & Ibrahim, 2022).

Kota Metro sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung yang secara historis mengembangkan identitas sebagai "kota pendidikan" memiliki kepentingan strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD, khususnya pada pos-pos yang menyasar pembangunan infrastruktur pendidikan, dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Data resmi Pemerintah Kota Metro menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,06 triliun atau 94,78 persen dari target anggaran sebesar

Rp1,12 triliun, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk yang ke-16 kalinya, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro (Badan Pengelolaan Pajak dan Aset Daerah Kota Metro, 2025; Info Metro Kota, 2026). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2025-2045 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro, 2025a) turut menetapkan sektor pendidikan sebagai salah satu dari sembilan belas Indikator Kinerja Utama pembangunan daerah, dengan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah sebagai capaian yang terus dipantau.

Meskipun data agregat realisasi APBD tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang relatif baik, penelitian yang secara spesifik menelaah keterkaitan antara efektivitas pengelolaan APBD dan capaian outcome pembangunan pendidikan di level kota, khususnya di Kota Metro, masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada level nasional, provinsi, atau perbandingan lintas kabupaten/kota tanpa menelaah secara mendalam konteks satu daerah tertentu dengan mengaitkannya pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kesenjangan (research gap) inilah yang mendasari perlunya penelitian yang menelaah keterkaitan antara efektivitas pengelolaan APBD Kota Metro secara agregat dengan capaian indikator pembangunan pendidikan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam dokumen perencanaan resmi.

Urgensi kajian ini diperkuat oleh materi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2026 yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro, yang secara eksplisit mengidentifikasi "infrastruktur yang kurang memadai" dan "kurangnya akses terhadap pendidikan" sebagai bagian dari permasalahan pembangunan Kota Metro untuk periode 2025-2045 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro, 2025b). Pengakuan resmi atas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa isu efektivitas pembangunan infrastruktur, termasuk pada sektor pendidikan, masih menjadi tantangan aktual bagi Pemerintah Kota Metro meskipun capaian pengelolaan keuangan daerah secara agregat tergolong baik, sehingga semakin memperkuat relevansi dan urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat efektivitas realisasi anggaran daerah Kota Metro berdasarkan data resmi yang dipublikasikan secara terbuka; dan (2) menelaah keterkaitan antara capaian pengelolaan

anggaran tersebut dengan indikator capaian pembangunan pendidikan dalam RPJMD, ditinjau dari perspektif keberlanjutan pembangunan. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai penerapan konsep Value for Money pada level pemerintah kota, sedangkan kontribusinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro dalam merumuskan kebijakan penganggaran pendidikan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Efektivitas Anggaran Sektor Publik dan Konsep Value for Money

Efektivitas anggaran pada sektor publik dipahami sebagai sejauh mana dana yang dialokasikan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program. Konsep Value for Money (VfM) menjadi kerangka teori utama yang relevan untuk mengukur kinerja anggaran sektor publik, yang menitikberatkan pada tiga komponen utama, yaitu ekonomi (economy), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness) (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019). Dalam konteks ini, setiap pengeluaran dana publik, termasuk pada sektor pendidikan, idealnya memberikan manfaat maksimal dengan biaya seminimal mungkin serta hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Belanja Modal dan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Belanja modal pemerintah daerah dialokasikan untuk pembentukan aset publik jangka panjang, termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang dipandang esensial untuk menopang aktivitas ekonomi dan produktivitas daerah. Studi mengenai efektivitas belanja modal pemerintah daerah di Pulau Jawa menemukan bahwa pengeluaran ini berperan penting dalam mendorong produktivitas ekonomi regional, sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen yang menempatkan investasi publik sebagai pendorong akumulasi modal (Aiko, Rosyidah, Tarigan, & Avriza, 2025). Di sisi lain, studi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh menemukan bahwa penyerapan belanja modal masih relatif rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga porsi terhadap total belanja daerah menjadi kecil dan berpotensi menghambat penyediaan infrastruktur publik, termasuk fasilitas pendidikan (Chandra, Darwanis, & Ibrahim, 2022).

2.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan keuangan daerah yang baik, tertib, dan sesuai regulasi menjadi instrumen strategis dalam menjamin bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendidikan. Meskipun demikian, pencapaian opini WTP tidak secara otomatis menjamin efektivitas program pada level kegiatan, karena opini tersebut lebih menitikberatkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan ketimbang pada capaian kinerja program secara substantif.

2.4 Pembiayaan Hijau (Green Finance) sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

Selain APBD, skema pembiayaan hijau (green finance) mulai berkembang sebagai instrumen alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, antara lain melalui penerbitan green sukuk dan green bond pada level nasional. Kajian mengenai faktor keberhasilan (critical success factors) penerapan green finance pada pengembangan infrastruktur perkotaan menunjukkan bahwa faktor makroekonomi, investasi ramah lingkungan, dan manajemen risiko merupakan determinan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya, sementara faktor regulasi dan literasi publik masih bersifat pendukung (Rawis, 2026). Meskipun skema ini masih terkonsentrasi pada level nasional dan proyek berskala besar, prinsip-prinsip green finance berpotensi diadaptasi pada level daerah sebagai pelengkap APBD dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan, terutama untuk fasilitas yang berorientasi efisiensi energi dan ramah lingkungan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini disusun dalam kerangka pemikiran evaluatif yang menghubungkan empat tahapan siklus anggaran, yaitu: (1) perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; (2) penganggaran melalui Peraturan Daerah tentang APBD; (3) pelaksanaan dan realisasi

anggaran yang tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran dan LKPD; serta (4) evaluasi capaian melalui perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi anggaran, yang pada akhirnya bermuara pada indikator keberlanjutan pembangunan infrastruktur pendidikan (ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan). Karena penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif berbasis analisis dokumen dan bukan penelitian kausal-korelasional, kerangka pemikiran ini tidak dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (H1, H2, dst.), melainkan digunakan sebagai acuan interpretatif dalam menganalisis data pada bagian Hasil dan Pembahasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan metode analisis dokumen (*documentary analysis*) atas data sekunder yang seluruhnya diperoleh dari publikasi resmi yang tersedia secara terbuka di internet, tanpa melibatkan pengumpulan data primer dari responden di lapangan maupun permohonan data khusus kepada instansi pemerintah. Objek penelitian adalah Pemerintah Kota Metro, Provinsi Lampung, dengan fokus pada efektivitas pengelolaan APBD secara agregat dan keterkaitannya dengan capaian indikator pembangunan pendidikan periode tahun 2021-2025.

Sumber data yang digunakan meliputi: (1) ringkasan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Metro; (2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) agregat sebagaimana dipublikasikan dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro; (3) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2025-2045; (4) laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kota Metro sebagaimana diberitakan secara resmi; serta (5) publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indikator pendidikan daerah. Seluruh dokumen tersebut diperoleh dari situs resmi pemerintah dan pemberitaan resmi, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro, serta portal informasi publik Pemerintah Kota Metro. Seluruh data yang digunakan bersifat agregat dan/atau pada level indikator makro daerah, tanpa memerlukan rincian anggaran per program/kegiatan pada level Perangkat Daerah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) perhitungan rasio efektivitas anggaran, yaitu perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan,

dikalikan seratus persen, dengan kriteria interpretasi: sangat efektif (>100%), efektif (90-100%), cukup efektif (80-90%), kurang efektif (60-80%), dan tidak efektif (<60%); dan (2) analisis tren capaian indikator pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) dalam RPJMD dibandingkan dengan target yang ditetapkan, untuk menilai keselarasan antara efektivitas realisasi anggaran secara agregat dengan capaian outcome pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dibatasi hanya pada data yang telah dipublikasikan secara resmi dan terbuka oleh Pemerintah Kota Metro pada saat naskah disusun. Analisis pada level program dan kegiatan yang lebih rinci per Perangkat Daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, berada di luar cakupan penelitian dokumenter ini dan dapat menjadi arah penelitian lanjutan apabila data tersebut telah dipublikasikan secara terbuka atau diperoleh melalui mekanisme permohonan informasi publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 1 menyajikan gambaran umum realisasi belanja daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data resmi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Metro.

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025

Indikator	Nilai/Capaian
Target belanja daerah TA 2025	Rp1,12 triliun
Realisasi belanja daerah TA 2025	Rp1,06 triliun
Rasio efektivitas realisasi belanja	94,78% (kategori efektif)
Opini BPK atas LKPD TA 2025	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16

Sumber: BPKAD Kota Metro (2025) dan Rapat Paripurna DPRD Kota Metro (2026), data diolah.

Dokumen RPJMD Kota Metro 2025-2045 turut memuat sejumlah indikator capaian pembangunan pendidikan yang relevan sebagai konteks pendukung, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Ketersediaan Infrastruktur dan Capaian Pendidikan Kota Metro (per 2024)

Indikator	Capaian
Rata-rata lama sekolah	11,01 tahun
Angka harapan lama sekolah	14,79 tahun
Jumlah satuan pendidikan TK/PAUD	63 unit
Jumlah satuan pendidikan SD	62 unit
Jumlah satuan pendidikan SMP	27 unit
Jumlah satuan pendidikan SLTA	17 unit
Jumlah sekolah inklusif	38 unit
Jumlah perguruan tinggi	14 unit

Sumber: Bappeda Kota Metro, Rancangan Akhir RPJMD Kota Metro 2025-2045, data diolah.

Untuk melihat tren capaian dari waktu ke waktu, Tabel 2a menyajikan target dan realisasi dua indikator kunci pendidikan dalam RPJMD Kota Metro periode 2021-2025.

Tabel 2a. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan Kota Metro 2021-2025

Tahun	Target RLS (tahun)	Realisasi RLS (tahun)	Target HLS (tahun)	Realisasi HLS (tahun)
2021	11,02	10,97	14,56	14,75
2022	11,10	10,98	14,65	14,76
2023	11,19	11,00	14,74	14,77
2024	11,28	11,01	14,83	14,79
2025 (target)	11,36	-	14,92	-

Keterangan: RLS = Rata-rata Lama Sekolah; HLS = Harapan Lama Sekolah. Sumber: Bappeda Kota Metro, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Metro 2026, data diolah.

Data pada Tabel 2a menunjukkan bahwa realisasi indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) secara konsisten berada di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD sepanjang periode 2021-2024, meskipun kedua indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan positif dari tahun ke tahun. Kesenjangan antara target dan realisasi ini menjadi salah satu indikasi awal bahwa capaian outcome pendidikan belum sepenuhnya sejalan dengan target perencanaan, sekalipun realisasi belanja daerah secara agregat tergolong efektif.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pada Tabel 1, rasio efektivitas realisasi belanja daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025 sebesar 94,78 persen tergolong dalam kategori "efektif" menurut kriteria pengukuran kinerja keuangan sektor publik, karena berada pada rentang 90-100 persen. Capaian ini diperkuat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kota Metro untuk keenam belas kalinya secara berturut-turut, yang mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah relatif akuntabel pada level agregat. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa daerah dengan opini WTP yang konsisten cenderung memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018).

Meskipun demikian, tingkat efektivitas pada level agregat belanja daerah tidak dapat secara langsung digeneralisasi sebagai efektivitas pada level program infrastruktur pendidikan secara spesifik. Sejalan dengan temuan kajian pustaka mengenai efektivitas anggaran pendidikan di Indonesia, besarnya alokasi dana pendidikan melalui skema seperti BOS dan DAK kerap masih didominasi penggunaannya untuk kebutuhan operasional rutin, sementara porsi untuk peningkatan mutu dan pengembangan infrastruktur secara strategis relatif terbatas (Astuti & Rahman, 2021; Lestari & Nugroho, 2022). Pola serupa juga ditemukan pada level belanja modal daerah secara umum, di mana penyerapan belanja modal termasuk untuk pembangunan infrastruktur publik kerap berada di bawah target yang direncanakan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh (Chandra, Darwanis, & Ibrahim, 2022).

Data indikator pendidikan pada Tabel 2, seperti rata-rata lama sekolah 11,01 tahun dan sebaran satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi, menunjukkan bahwa Kota Metro secara relatif memiliki basis infrastruktur pendidikan yang cukup lengkap dibandingkan skala kota kecil. Namun demikian, temuan pada Tabel 2a memperlihatkan bahwa realisasi indikator outcome pendidikan (RLS dan HLS) secara konsisten berada di bawah target RPJMD sepanjang 2021-2024, meskipun keduanya bertumbuh positif dari tahun ke tahun. Kondisi ini sejalan dengan pengakuan resmi Bappeda Kota Metro dalam forum konsultasi publik RKPD 2026 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro, 2025b) yang menempatkan "infrastruktur yang kurang

memadai" dan "kurangnya akses terhadap pendidikan" sebagai bagian dari permasalahan pembangunan daerah, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan antara efektivitas realisasi belanja daerah pada level agregat dengan capaian outcome pendidikan pada level substantif. Untuk menilai secara lebih rinci apakah kesenjangan tersebut berkorelasi langsung dengan efektivitas realisasi anggaran per program dan kegiatan, diperlukan penelitian lanjutan yang menelaah data pada level Perangkat Daerah, termasuk melalui mekanisme keterbukaan informasi publik, yang berada di luar cakupan penelitian dokumenter ini.

Dari perspektif keberlanjutan pembangunan, hasil kajian mengenai faktor keberhasilan implementasi green finance pada pengembangan infrastruktur perkotaan menunjukkan bahwa investasi ramah lingkungan dan manajemen risiko merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan skema pembiayaan tersebut (Rawis, 2026). Meskipun implementasi green finance di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi pada proyek berskala nasional, prinsip-prinsip tersebut relevan untuk mulai dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Metro sebagai wacana pelengkap APBD dalam jangka menengah-panjang, khususnya untuk pembangunan infrastruktur pendidikan baru yang berorientasi pada efisiensi energi dan ketahanan lingkungan, mengingat keterbatasan fiskal daerah yang umum dihadapi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan APBD Kota Metro pada level agregat tergolong baik, namun keselarasannya dengan capaian outcome pendidikan pada level substantif masih menunjukkan kesenjangan, sehingga evaluasi yang lebih mendalam memerlukan penguatan transparansi data hingga level program dan kegiatan, sejalan dengan prinsip Value for Money dan praktik anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) (Mardiasmo, 2018; Sari & Handayani, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan APBD Kota Metro pada level agregat Tahun Anggaran 2025 tergolong efektif, dengan rasio realisasi belanja daerah sebesar 94,78 persen dan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam belas kalinya secara berturut-turut. Kondisi ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang

relatif akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, efektivitas pada level agregat tersebut belum tentu selaras dengan capaian outcome pendidikan pada level substantif, sebagaimana ditunjukkan oleh kesenjangan yang konsisten antara target dan realisasi indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam RPJMD sepanjang 2021-2024.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan: (1) bagi Pemerintah Kota Metro, perlunya penguatan transparansi data anggaran melalui publikasi Laporan Realisasi Anggaran yang terpilah hingga level program dan kegiatan, khususnya pada sektor pendidikan, agar dapat mendukung pengawasan publik dan evaluasi kebijakan yang lebih akurat; (2) perlunya penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dan *e-budgeting* yang lebih konsisten pada level Dinas Pendidikan, mengacu pada praktik baik yang telah diterapkan sejumlah sekolah dan daerah lain di Indonesia (Suhardjono, 2021; Sutrisno, 2021; Nasution & Rahayu, 2023); dan (3) perlunya kajian awal mengenai potensi skema pembiayaan hijau (*green financing*) sebagai instrumen pelengkap APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan data yang terbatas pada informasi agregat dan level indikator makro daerah yang dipublikasikan secara terbuka, sehingga tidak menjangkau analisis efektivitas pada level program dan kegiatan per Perangkat Daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis pada level program dan kegiatan, termasuk melalui mekanisme keterbukaan informasi publik kepada Dinas Pendidikan dan BPKAD Kota Metro, serta memperluas cakupan analisis dengan membandingkan capaian Kota Metro dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik fiskal yang relatif serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiko, H. Z. R., Rosyidah, A. K., Tarigan, C. I., & Avriza, M. (2025). Analisis efektivitas belanja modal pemerintah daerah terhadap peningkatan produktivitas ekonomi di Pulau Jawa periode 2016-2023. *SKIEJ: Sunan Kalijaga Islamic Economics Journal*, 4(2), 1-19. <https://doi.org/10.14421/skiej.2025.4.2.2784>

- Astuti, D., & Rahman, A. (2021). Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 145-159.
- Badan Pengelolaan Pajak dan Aset Daerah Kota Metro. (2025). APBD 2025: Peraturan Daerah dan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2025. <https://bpkad.metrokota.go.id/apbd-2025-2/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro. (2025a). Rancangan akhir RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2045. Bappeda Kota Metro.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro. (2025b). Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Metro tahun 2026: Isu strategis, tantangan, dan fokus pembangunan Kota Metro 2026 [Bahan paparan]. Bappeda Kota Metro.
- Chandra, C. P. S., Darwanis, & Ibrahim, R. (2022). Efisiensi belanja modal pemerintah daerah: Studi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5(2), 222-232.
- Hidayat, R., & Susanto, D. (2020). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah menengah negeri. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 34-48.
- Info Metro Kota. (2026, Juli 24). Paripurna DPRD Metro: Pemkot laporkan APBD 2025 dan torehkan WTP ke-16. <https://info.metrokota.go.id/paripurna-dprd-metro-pemkot-laporkan-apbd-2025-dan-torehkan-wtp-ke-16/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.
- Lestari, D., & Nugroho, A. (2022). Efektivitas penggunaan dana BOS dalam mendukung inovasi pembelajaran digital di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 10(3), 211-225.
- Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Nasution, M., & Rahayu, S. (2023). Digitalisasi pengelolaan anggaran pendidikan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Transformasi Pendidikan*, 5(1), 22-36.

- Prasetyo, A., & Nuryani, L. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 6(1), 45-60.
- Putra, Y., & Kurniasih, D. (2021). Pemerataan anggaran dan kualitas pendidikan di Indonesia: Analisis kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(1), 67-80.
- Rahmadhea, S. (2025). Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 43-55.
- Rawis, D. A. (2026). Analisis critical success factors (CSF) green finance dalam pengembangan infrastruktur smart city di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 26(1), 291-299. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v26i1.6448>
- Sari, N., & Handayani, E. (2021). Performance-based budgeting sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. *Jurnal Manajemen Publik Indonesia*, 8(3), 201-217.
- Suhardjono. (2021). Manajemen keuangan sekolah berbasis kinerja dalam peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 145-160.
- Sutrisno, E. (2021). Efektivitas pengawasan dan pengendalian anggaran belanja sekolah di Madrasah Aliyah. *UNIDA-JUMP: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 66-75.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.